

Gaji Dan Tunjangan Pns Dalam Uu Asn Remunerasi Pns

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PegawaiNegeri Sipil, 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sebuah buku Terbitan dari VisiMedia Pustaka yang berisikan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Aparatur Sipil Negara, CPNS, PPPK, Pegawai Kontrak, PNS, ASN, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian.

Pembangunan birokrasi yang reformis menjadi isu utama dan tujuan penyusunan buku ini. Kegelisahan yang muncul akibat banyaknya penyimpangan yang terjadi di pemerintahan membuat penulis merasa terpanggil hati nuraninya untuk berpikir dan menganalisa situasi kondisi yang ada dan melahirkan solusi dan pemecahan masalah menuju perbaikan berkelanjutan. Tidak bisa dipungkiri bahwa regulasi justru ikut menjadi sumber masalah. Ketika regulasi diterapkan melahirkan tambahan masalah. Masalah ini dibedah secara praktis dan empiris sehingga solusi yang ditawarkan pun sangat praktis dan empiris juga. Buku ini akan menjadi panduan praktis bagi para birokrat yang berkecimpung di pemerintahan pusat, daerah dan desa. Sifat praktis dan aplikatif menjadi unsur utama dalam materi buku ini. Oleh karena itu penerapannya bisa dilakukan oleh birokrasi di semua tingkatan.

Perusahaan dan karyawan memiliki hubungan simbiosis mutualisme yang dibungkus dengan sisi kemanusiaan dan bisnis di antara keduanya. Karyawan membutuhkan gaji atau upah yang diberikan perusahaan, sedangkan perusahaan membutuhkan tenaga karyawan untuk terus dapat beroperasi.Manajemen penggajian menjadi cara yang dipakai untuk mengelola gaji yang diberikan kepada karyawan. Tujuan umumnya memberikan gaji yang layak, tetapi tidak membebani perusahaan. Buku Panduan Praktis Menyusun Sistem Penggajian & Benefit ini membahas seluk-beluk penggajian dan benefit di perusahaan. Di dalamnya memaparkan sistem dan kebijakan manajemen penggajian, struktur gaji sesuai dengan peringkat jabatan, dan membuat desain paket benefit(tunjangan, fasilitas, insentif, dan bonus). Selain itu, buku ini juga memberikan contoh perhitungan gaji, kompensasi PHK, dan dana pensiun. Raih Asa Sukses

Hukum Administrasi Negara SektorBadan Penerbit FHUI

Buku Glosarium Istilah Pemerintahan ini memuat kumpulan materi inti yang sering digunakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum, cakupan materi buku ini sangat luas, baik dari aspek teoretis maupun praktisnya. Buku ini juga dilengkapi dengan Lampiran yang berisi tentang materi penting yang berhubungan dengan teknis pendukung dalam melaksanakan berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga layak untuk Anda baca dan memberi andil bagi peningkatan wawasan Anda. Adapun materi teknis yang tersaji dalam Lampiran pada buku ini, banyak membahas teknis pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik pemerintah. Sebab, penulis menyadari bahwa bidang-bidang yang paling penting dalam mendukung tata penyelenggaraan/pengelolaan pemerintahan yang baik (good government), wajib mengedepankan prinsip efektif, efisien dan ekonomis di dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik pemerintah. Buku persembahan

penerbit Prenada Media Group

Bingung menentukan pekerjaan mana yang harus dipilih? Sebelum mengirimkan surat lamaran, ada baiknya kamu menyimak dulu seluk-beluk profesi-profesi yang ada. Buku yang dikemas sederhana ini memberikan informasi yang lengkap mengenai: - deskripsi dan ruang lingkup pekerjaan tersebut, - besaran gaji yang akan kamu terima, - jenjang karier dari profesi pilihanmu, - kriteria yang diperlukan untuk profesi tersebut, - tip dan trik menjalani profesi pilihanmu, - dan masih banyak lagi. Serba-serbi Profesi tidak hanya membahas profesi untuk perusahaan swasta, tetapi dilengkapi juga dengan informasi seputar profesi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Semua hal yang ingin kamu tahu tentang profesi ada di sini. Kamu tidak perlu lagi bertanya-tanya tentang profesi yang hendak kamu lamar, apalagi sampai asal mengirimkan surat lamaran. Sekarang, sudah nggak zaman lagi salah milih pekerjaan. -Bukune-

"Korupsi adalah masalah yang sangat membahayakan bagi Indonesia baik di masa kini dan masa mendatang. Apresiasi yang tinggi diberikan pada setiap usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) karena memang seharusnya Indonesia bisa sedikit demi sedikit lepas dari KKN dan akhirnya terbebas darinya. Buku ini bukan sekadar bunga rampai atau kumpulan tulisan mengenai korupsi, melainkan ulasan komprehensif dari para pakar dan pejuang antikorupsi tentang berbagai aspek korupsi di Indonesia, sebagai akumulasi pengetahuan dan pengalaman 30-an pakar dari berbagai bidang yang berasal dari berbagai negara. Harapan para pakar, pejuang antikorupsi, dan kita semua adalah Indonesia yang bebas dari korupsi sehingga masyarakat luas bisa sejahtera karena terhindar dari dampak buruk KKN yang merusak tatanan perekonomian dan kesejahteraan yang berkeadilan."

Desentralisasi dalam Perspektif Pembangunan Politik mencoba menggambarkan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia yang sama tuanya dengan pemerintahan Indonesia itu sendiri, satu kesatuan tidak terpisahkan. Asas desentralisasi pemerintahan daerah di Indonesia itu sesuatu yang unik, seakan tidak pernah selesai dan tidak pernah sesuai, baik dari segi format penyelenggaraan maupun implementasi dan pencapaian. Spektrum pemerintahan daerah itu seperti ruang tanpa batas, gerakannya tidak pernah menyentuh sisi sisi yang pas. Hal tersebut merupakan gambaran betapa tingginya dinamika kebutuhan daerah, dinamika politik di daerah hingga hampir menyentuh negara serikat modern, posisi daerah laksana federasi, sebagai satu solusi. Bagaimana hal ini diamati dalam kaca mata (perspektif) pembangunan Politik Indonesia telah memasuki lima priode konstitusi dan amandemen Undang Undang Dasar. Hal ini turut mewarnai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lima periode konstitusi tersebut tidak terlepas dari gangguan luar sebagai satu negara yang baru merdeka, dinamika politik dalam negeri juga merupakan satu faktor yang turut mempengaruhi. Bersamaan dengan pergantian konstitusi itu pula disusul terbitnya undang undang mengenai pemerintahan daerah. Bahkan pada satu konstitusi pergantian undang undang yang mengatur pemerintahan daerah terjadi berulang ulang, termasuk penggantian undang undang dengan

peraturan pemerintah pengganti undang undang. Hingga saat ini kita telah mengenal tidak kurang dari 9 (sembilan) undang undang termasuk Penpres dan Perpu pemerintahan daerah. Sembilan peraturan perundang undangan pemerintahan daerah itu masing masing dengan nomenklatur berbeda. Apabila dikaji secara cermat, maka dapat disimpulkan bahwa pergantian undang undang itu tidak merupakan penyempurnaan dari satu undang undang kepada undang undang sebelumnya, bahkan tidak ditemukan konsistensi dan kesinambungan. Hal ini mengindikasikan bahwa pergantian undang undang itu tidak pada tataran perbaikan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan atas orientasi politik, sehingga dapat dikatakan hingga saat ini sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah belum menemukan bentuk dan postur yang tepat. Indonesia yang majemuk atau sangat plural adalah fakta yang menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak tepat untuk digeneralisir dalam satu undang undang. Pertanyaannya apakah satu daerah diatur dengan satu undang undang yang spesfik, kiranya tidak seekstrim itu. Satu undang undang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat umum cukup ditindaklanjuti dengan peraturan daerah yang spesifik. Kenapa demikian, karena tidak dapat dipungkiri bahwa semua daerah di Indonesia berasal dari latar belakang sejarah yang berbeda, kebutuhan berbeda, jangkauan pemikiran berbeda, potensi daerah berbeda sehingga tidak cukup diselesaikan dengan kebijakan makro. Kebijakan mengenai keuangan dalam bentuk transfer fiskal misalnya berdampak pada belanja daerah yang tidak sesuai, kerumitan distribusi dengan segala macam kasus berdampak pada daerah yang selalu bergantung secara ekonomi seiring dengan kebutuhan politik atas nama negara kesatuan.

Buku ini mencoba mengulas bagaimana implementasi sudut pandang ekonomi dalam pendidikan dan pengaruh prinsip ekonomi dalam pembentukan serta pelaksanaan sebuah sistem pendidikan, menuju manajemen pendidikan dan efektif dan efisien. Oleh karena itu, rentang pembahasannya pun mencakup hubungan, urgensi, dan konsep investasi SDM; biaya pendidikan: pembiayaan dan strukturnya di Indonesia dan berbagai negara, peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan pendidik (guru) dan hubungannya dengan manajemen pendidikan yang efisien. Buku persembahkan #PrenadaMediaGroup Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuka peluang kalangan profesional untuk menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Profesional dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu. Sesuai amanat Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), rekrutmen PPPK juga melalui seleksi. Ada dua tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Ebook ini dilengkapi kisi-kisi terbaru dari PERMEN PANRB, ringkasan materi, paket soal dan pembahasan. Semua dikupas secara detail dan mudah dipahami. Buku

persembahan penerbit cmedia #PPPKNonguru

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPKN) membuka peluang kalangan profesional untuk menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Profesional dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu. Sesuai amanat Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), rekrutmen PPPKN juga melalui seleksi. Ada dua tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPKN, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Ebook ini dilengkapi kisi-kisi terbaru dari PERMEN PANRB, ringkasan materi, paket soal dan pembahasan. Semua dikupas secara detail dan mudah dipahami. Buku persembahan penerbit Cmedia #PPPKNonguru

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPKN) membuka peluang kalangan profesional untuk menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Profesional dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu. Sesuai amanat Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), rekrutmen PPPKN juga melalui seleksi. Ada dua tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPKN, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Ebook ini dilengkapi kisi-kisi terbaru dari PERMEN PANRB, ringkasan materi, paket soal dan pembahasan. Semua dikupas secara detail dan mudah dipahami. Buku persembahn penerbit Cmedia #PPPKNonguru

Dalam memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), DPR RI sebagai salah satu lembaga perwakilan wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dalam rangka untuk mendorong perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Termasuk didalamnya pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung tugas dan fungsi DPR RI tersebut serta memperkuat referensi dan memudahkan pemahaman terhadap IHPS I Tahun 2019, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretaris Jenderal DPR RI telah membuat ringkasan terhadap LHP atas 34 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi. Ringkasan terhadap LHP atas 34 LKPD Provinsi. Ringkasan ini disusun sebagai bentuk dukungan atas kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dalam fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah selama periode satu tahun anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Buku Hukum Administrasi Negara (HAN) Sektor bertujuan guna memenuhi kebutuhan perkuliahan mata kuliah Hukum Administrasi Negara Sektor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Substansi utama isi buku ini antara lain memuat uraian permasalahan kepegawaian sipil di Indonesia, mulai dari sistem lama (terdahulu) hingga ke sistem yang terbaru—undang-undang kepegawaian sipil—yang mulai diberlakukan, perubahan paradigma pemerintahan, manajemen kepegawaian pemerintah, masalah kebijakan dan peraturan tentang pegawai negeri sipil, penataan birokrasi, dan proses manajemen kepegawaian sipil, serta alternatif solusi persoalan yang dihadapi dalam penataan dan pengelolaan kepegawaian sipil di Indonesia. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup Sistematika buku “Reformasi Administrasi Publik” ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 8 Bab, diantaranya: Memahami Administrasi dan Administrasi Publik yang membahas tentang Pengertian Administrasi baik arti Sempit dan Luas, Pengertian Administrasi Publik dan Pembagian Administrasi Publik; Konsep Dasar Reformasi dan Reformasi Administrasi Publik membahas tentang Pengertian Reformasi, Pengertian Reformasi Administrasi Publik, Strategi Reformasi Administrasi Publik; Sejarah Perkembangan Paradigma Administrasi Publik membahas tentang Paradigma Old Public Administration, Paradigma New Public Management, Paradigma New Public Services dan Perbandingan OPA, NPM, dan NPS; Patologi Administrasi Publik membahas tentang Pengertian Patologi dan Patologi Administrasi Publik, Bentuk-Bentuk Patologi Administrasi Publik, dan Terapi Patologi Administrasi Publik; Lingkup Reformasi Administrasi Publik membahas tentang Tuntutan Reformasi Administrasi Publik, dan Tujuan Reformasi Administrasi Publik; Reformasi Aparatur Negara membahas tentang Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan Reformasi Aparatur Negara ; Reformasi Pelayanan Publik membahas tentang Definisi Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan Publik, dan Reformasi Pelayanan Publik; dan Reformasi Birokrasi Pemerintah yang membahas tentang Pengertian Birokrasi, serta Reformasi Birokrasi Pemerintah.

Perubahan dari masa Orde Baru menuju Reformasi, turut membentuk pengaturan ulang bagi berjalannya akumulasi kapital dan relasi kekuasaan negara. Pada masa Orde Baru kekuasaan berjalan secara terpusat. Kebijakan publik menjadi kewenangan tunggal dari pemerintah di bawah kendali rezim otoriter Soeharto. Walaupun liberalisasi pasar telah dibuka di pertengahan 1980-an, tetapi kepentingan akumulasi kapital harus bernegosiasi dengan rezim penguasa agar mendapatkan konsesi. Sementara kuasa pendisiplinan oleh negara menjadi peranti agar rakyat menuruti kehendak penguasa. Proses demokrasi dikekang dengan dalih stabilitas dan pembangunan ekonomi nasional. Gerakan rakyat didepolitisasi dengan kebijakan massa mengambang (floating mass). Namun, pada perkembangannya, perlawanan terhadap kuasa negara-kapitalistik versi Orde Baru tetap bermekaran. Pada tahun 1998, kuasa negara yang telah dibangun dan dipertahankan selama lebih dari 32 tahun pada akhirnya runtuh oleh angin perubahan. Krisis ekonomi, gerakan rakyat, dan perpecahan di kelas elite menjadi pemantik jatuhnya rezim Soeharto. Seperti

bunga di musim semi, cita-cita perubahan tumbuh bermekaran menghiasi era baru yang disebut “Reformasi”. Proses demokratisasi secara politik mulai terjadi. Akan tetapi bunga-bunga yang mekar itu mulai layu ketika ketimpangan ekonomi justru semakin melebar, ekonomi nasional terkoyak, dan pemaksaan “pembangunan” untuk tujuan akumulasi kapital telah mengorbankan rakyat kecil. Dapat dibayangkan, setelah terjerat oleh kuasa negara, Indonesia kini terkurung dalam rezim dominasi pasar. Buku yang hadir di hadapan pembaca ini mengulas tentang kebijakan publik di Indonesia yang berada dalam pusaran perubahan ideologi dari kuasa negara ke dominasi pasar. Perubahan rezim dan relasi kuasa, turut mengubah proses pengaturan yang dilakukan oleh negara, kekuatan bisnis, dan gerakan rakyat. Buku ini dengan pendekatan studi kritis, analisis historis dan komparatif menyediakan analisis tajam terhadap kondisi ekonomi politik Indonesia pasca 20 tahun Reformasi. Buku ini menunjukkan bahwa di tengah keruwetan politik, ekonomi, dan sosial-budaya di Indonesia, selalu ada alternatif lain untuk membawa perubahan ke arah keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi sebagian besar rakyat.

Momentum reformasi di bidang keuangan negara di Indonesia ditandai terbitnya paket undang-undang bidang Keuangan Negara. Salah satu ketentuan pokok dalam paket undang-undang tersebut yaitu mengenai kedudukan Menteri Keuangan dan Menteri/ Pimpinan Lembaga dalam pengelolaan keuangan negara. Pada hakikatnya Menteri Keuangan bertindak sebagai Chief Financial Officer (CFO) sedangkan setiap Menteri/Pimpinan Lembaga bertindak sebagai Chief Operational Officer (COO). Sejalan dengan pemisahan tersebut, dalam pelaksanaan anggaran terdapat pemisahan yang tegas antara pemegang kewenangan kebendaharaan atau CFO yaitu Menteri Keuangan dan pemegang kewenangan administratif atau COO yaitu Menteri/ Pimpinan Lembaga.

Kewenangan administratif yang dijalankan oleh Kementerian/lembaga meliputi kewenangan untuk melakukan perikatan, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan.

Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang dalam hal kebendaharaan di mana tidak hanya bertindak sebagai kasir namun merupakan pengelola keuangan dalam arti yang seutuhnya. Dalam pasal 7 Undang-undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berwenang diantaranya untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara, menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Negara dan menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Dalam rangka menjalankan wewenangnya agar dapat berjalan secara optimal, tentunya Menteri Keuangan selaku BUN memerlukan suatu sistem yang memadai, yaitu sistem yang diantaranya mampu menjaga keseimbangan antara

pengeluaran dan penerimaan untuk mencegah cash miss match, sistem yang mampu memberikan informasi yang memadai mengenai kebutuhan dana dan sistem yang mampu mengontrol realisasi anggaran dengan alokasi dana yang ada. Untuk tercapainya tujuan-tujuan di atas, diperlukan suatu mekanisme kontrol terhadap perikatan-perikatan yang akan mengakibatkan pengeluaran negara. Suatu mekanisme di mana pengeluaran-pengeluaran yang akan terjadi dimasa depan, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat diketahui dan dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Manajemen komitmen merupakan salah satu alat yang semestinya digunakan oleh BUN dalam rangka menjalankan fungsi tersebut agar dapat memperoleh hasil yang optimal.

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuka peluang kalangan profesional untuk menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Profesional dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu. Sesuai amanat Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), rekrutmen PPPK juga melalui seleksi. Ada dua tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Ebook ini dilengkapi kisi-kisi terbaru dari PERMEN PANRB, ringkasan materi, paket soal dan pembahasan. Semua dikupas secara detail dan mudah dipahami. Buku persembahkan penerbit Cmedia #PPPKGuru

Guru adalah sosok utama, ujung tombak dalam penerapan kurikulum, disamping kepala sekolah dan tenaga pendidik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyoroti bahwa pemahaman dan kesiapan ketiganya dalam menerapkan kurikulum 2013 pada proses pembelajaran menjadi kunci utama keberhasilan implementasi Kurikulum 2013. Dukungan penuh dari seluruh stekholder yang ada di sekolah menjadi point penting dalam keberhasilan peserta didik. Kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan harus mampu meningkatkan kinerja guru baik dalam hal kompetensi maupun keterampilan dalam proses pembelajaran, sekolah perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja guru tersebut dalam mengembangkan segala potensinya. Salah satunya yaitu dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat). Pendidikan dan pelatihan memberi kesempatan kepada guru untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap baru yang mengubah perilakunya yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja serta akan berdampak pula pada peningkatan prestasi belajar siswa. Dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh guru-guru, diharapkan guru akan lebih paham dengan dunia kerja, dapat mengembangkan kompetensi dan kepribadiannya, penampilan kerja individu, mengembangkan karir, sehingga guru akan menjadi lebih berkompeten. Buku ini memberikan gambaran yang luas tentang Pengembangan Profesionalisme guru dalam kurikulum 2013. Berbagai jenis pendidikan dan pelatihan (diklat) dapat dilakukan oleh sekolah secara

mandiri maupun bekerja sama dengan lembaga lain. Dengan upaya tersebut lahir guru-guru yang mampu menjadi tauladan, guru juga harus memiliki penilaian yang akurat melalui beberapa instrumen penilaian yang ada. Semoga buku ini memberikan mamfaat bagi kita semua terutama lembaga pendidikan. Selamat membaca.

Puji Syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam proses penyusunan buku ini sehingga buku ini bisa terselesaikan dengan lancar. Undang-Undang ASN (Aparatur Sipil Negara) yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini dibuat bertujuan untuk menumbuhkan iklim kerja yang profesional kepada para aparatur sipil negara. Sehingga para pegawai ASN bisa bekerja dengan maksimal, tanpa ada intervensi, bersih dari praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dan menjalankan fungsi pelayanan kepada publik secara baik dan maksimal. Buku Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) berisi pasal demi pasal yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara, mulai dari asas, prinsip dasar, kode etik, kode perilaku, kedudukan, status, dan masih banyak lainnya. Di dalam buku ini juga dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, buku ini berisi tentang aturan-aturan serta manajemen Aparatur Sipil Negara sehingga bisa menjalankan fungsi dan peran untuk melayani publik dengan baik dan maksimal.

Memahami APARATUR SIPIL NEGARA Dari Dasarnya PENULIS: M. MU'IZ R. ISBN : 978-623-7953-33-3 Terbit : April 2020 Sinopsis: Kalau seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia belum membaca Undang-Undang tentang ASN, maka ibarat seorang Umat Beragama yang belum membaca Kitab Sucinya di dunia. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, sedangkan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Secara lengkap, buku ini akan menguraikan dan menjelaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengenai: Penjelasan Umum, Ketentuan Umum, Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik dan Kode Perilaku, Jenis, Status, dan Kedudukan, Jabatan ASN, Hak dan Kewajiban, Kelembagaan, Manajemen ASN, Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pegawai ASN yang Menjadi Pejabat Negara, Organisasi, Sistem Informasi ASN,

Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup, sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh semua. Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Buku ini disusun sebagai salah satu wujud kontribusi penulis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, terutama dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Seperti kita ketahui bersama bahwa setiap organisasi tidak mungkin bisa sukses tanpa keberadaan orang-orang di balik organisasi tersebut. Oleh sebab itu, manusia merupakan kunci kelangsungan dan keberhasilan sebuah organisasi. Manusia, sebagai sumber daya di dalam organisasi haruslah diatur sedemikian rupa agar terkoordinasi dengan baik dan bisa mendukung pencapaian rencana strategis organisasi. Apabila sumber daya manusia ini tidak dikelola dengan benar, maka kesuksesan organisasi dalam pencapaian rencana strategisnya akan sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa manajemen SDM merupakan hal yang penting dalam menjalankan suatu organisasi/ institusi/perusahaan, bahkan pada level Kementrian dan Pemerintah. Dalam buku ini, penulis merangkai pendapat dan teori dari berbagai pakar manajemen SDM, baik yang berasal dari kalangan akademisi maupun praktisi. Penulis juga menambahkan pengayaan materi dari pengalaman sebagai pengajar dan konsultan serta praktisi yang terjun secara nyata di dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkup perusahaan milik pemerintah, swasta, campuran maupun lembaga di lingkungan universitas. Penulis berharap buku ini mampu memberikan gambaran dasar mengenai pengelolaan sumber daya manusia dan praktik- praktiknya dengan ringan dan lugas bagi para pembacanya. Di dalam buku ini juga dilengkapi dengan berbagai suplemen yang menambah pengetahuan para pembaca mengenai praktik-praktik manajemen SDM yang nyata di Indonesia. Harapannya, setelah membaca dan mempelajari buku ini pembaca tidak hanya mumpuni di dalam berteori saja tetapi juga memiliki gambaran mengenai bagaimana praktik manajemen SDM yang nyata. Buku ini dikelompokkan menjadi lima bagian mengikuti alur manajemen SDM. Tujuannya agar pembaca bisa mengikuti tata urutan proses pengelolaan SDM di dalam organisasi sehingga bisa membantu mempercepat proses pembelajarannya. Selain itu, buku ini juga bisa digunakan bukan hanya oleh kalangan akademisi saja seperti dosen dan mahasiswa, tetapi juga bisa digunakan oleh semua pihak yang ingin mendalami topik manajemen SDM. Penulis menyadari buku ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca sekalian guna meningkatkan kualitas dari buku ini sehingga sumbangsih dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman yang diberikan pun dapat lebih optimal. Akhir kata, penulis berharap buku ini bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi pembaca yang berasal dari praktisi dalam me-manage SDM di lingkungannya masing-masing agar dapat memberikan value added bagi perusahaannya. Sedangkan bagi rekan-rekan pembaca yang berasal dari kalangan akademisi, konsultan, dan masyarakat semoga dapat menambah pengayaan pengetahuan

khususnya di bidang SDM.

On social and political situation in Papua, Indonesia.

Ide awal penulisan buku ini sebenarnya beranjak dari respon para pembaca 'How To Be a Smarter Taxpayer? Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas?' Setelah buku itu sukses di pasar, banyak pembaca yang mengharapkan agar hadir pula buku serupa untuk kalangan fiskus: bagaimana membuat administrator pajak lebih cerdas. Buku ini berusaha memberikan jawabannya meskipun kemudian didapati bahwa membuat administrasi pajak lebih efektif tidak sesederhana mencerdaskan pebayar pajak. Pihak yang disebut terakhir memiliki tujuan yang spesifik: menuntaskan hak dan kewajiban pajak, atau kalau bisa meminimalkan beban pajak sepanjang dimungkinkan undang-undang. Pembentukan administrasi pajak, di sisi lain, tidak bisa hanya dilakukan pada sasaran individual dari perspektif mikro, melainkan harus mencakup keseluruhan sistem secara komprehensif. Tentu tidak ada niat memandang sebelah mata upaya-upaya pemberdayaan personel aparat pajak di level individual, namun pendekatan makro adalah suatu keniscayaan, bahwa administrasi pajak mesti dilihat secara utuh sebagai institusi, yang di dalamnya manusia adalah salah satu elemen penting. Individu yang baik dan kompeten tidak akan banyak berarti jika sistem dan institusi tidak kondusif. Lebih dari itu, buku ini menyadari bahwa tema utama reformasi administrasi pajak terlalu kompleks untuk dijawab dengan pendekatan 'how to,' sehingga pendekatan holistik dan komprehensif mutlak diperlukan. Jadilah buku seperti yang sekarang di tangan Anda dengan cakupan pembahasan sangat luas dalam skala perspektif ruang dan waktu.

Berdasarkan UU Nomer 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 49 Ayat (2) bahwa tarif ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan. Lalu pada peraturan turunanannya yaitu Permenkes Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 18 Ayat (2) diatur bahwasanya tarif layanan dihitung berdasarkan biaya satuan (Unit Cost). Tarif merupakan penjumlahan antara Biaya Sarana atau Jasa Sarana (Istilahnya mungkin kurang tepat kalau disebut JASA) yang dihitung berdasarkan Biaya Satuan dan ditambah Jasa Pelayanan. Sehingga Jasa Pelayanan adalah salah satu komponen tarif sementara prinsip biaya satuan adalah menghitung setiap biaya per jenis layanan atau sering disebut Fee For Services (FFS). Sehingga tarif yang dihasilkan dari perhitungan biaya satuan adalah Tarif Fee For Services. Salah satu prinsip pembagian jasa pelayanan adalah No Work No Pay yang bermakna bahwa pembagian jasa pelayanan harus secara Fee For Services. Sehingga kesimpulannya adalah antara tarif biaya satuan dengan jasa pelayanan sama-sama bersifat Fee For Services yang berarti sejalan sehingga tidak ada masalah dalam hal ini. Karena untuk membagi jasa pelayanan yang berdasarkan tarif biaya satuan tetap menggunakan kaidah Fee For Services. Buku Model Pembagian Jasa Pelayanan Di Rumah Sakit Dengan Metode Konversi Dan Proporsi ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.

Alhamdulillahirabbilamin. Puji syukur kepada Allah Swt., atas segala nikmat, karunia dan inayah-Nya buku ini penulis berhasil susun. Buku “Manajemen Pelayanan Publik” menjadi penting untuk dipelajari dan dikembangkan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Baik dalam ranah akademisi maupun praktisi. Hal ini mengingatkan, bahwa kebutuhan akan pelayanan publik yang baik, berkualitas dan sesuai dengan kepentingan masyarakat sangat diharapkan, terutama pada pelayanan dasar. Pelayanan publik tidak hanya berbicara dalam aspek teknis, tetapi formulasi atau konsepsi dasar, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan penting untuk diaktualisasikan bagi aparaturnegara.

Adapun tujuan dari Buku ini adalah untuk memberi wawasan yang lebih baik bagi setiap pembacanya terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Supaya lebih mengerti tentang Hukum Administrasi Negara terutama dalam hal konseptual dan teori yang dipaparkan dalam pembelajaran mata Hukum Administrasi Negara.

[Copyright: 806f31447f63a485674c2468fa144e20](https://doi.org/10.24127/806f31447f63a485674c2468fa144e20)